Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Kerugian Negara Capai Rp 429 Juta

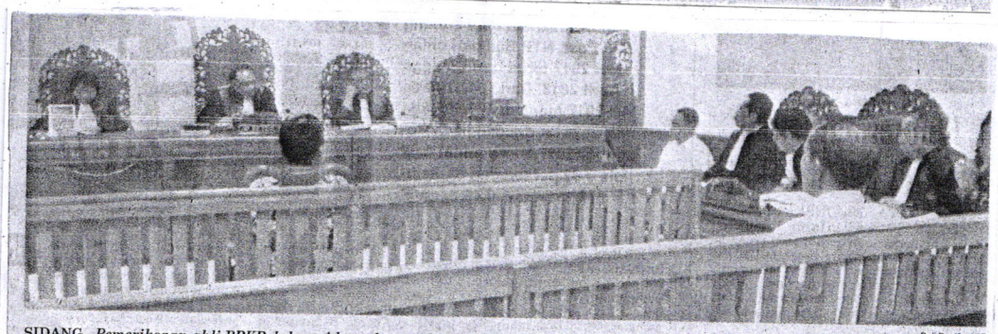

SIDANG - *Pemeriksaan ahli BPKP dalam sidang dugaan korupsi retribusi Terminal Manuver Gilimanuk.* Bali Post/kmb37

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menghadirkan sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi retribusi Jasa Usaha Terminal Manuver Gilimanuk, JPU Made Pasek Budiawan menghadirkan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bali di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (4/5) kemarin. Ahli tersebut adalah Putu Budiartha, S.E.

Di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila dan dua terdakwa yakni I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, S.H., M.Si. yang kala itu menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jembrana dan I Nengah Darna, Budiartha mengatakan bahwa hasil pemeriksan dokumen yang diberikan pihak kejaksaan uang yang disetor kurang dari hasil pungutan yang diterima. Dijelaskan, pungutan yang dihitung dari Januari hingga Maret 2017 dilakukan penghitungan.

Dari sana didapat adanya penyetoran uang ke kas daerah yang tidak sesuai hasil penerimaan di Terminal Manuver Gilimanuk. Ahli menyebut sisa uang itu dibagi-bagi oleh bendahara pembantu, terdakwa Nengah Darna. Dari hasil ekspos yang telah dilakukan dan berdasarkan bukti dokumen yang diperiksa, ditemukan adanya kerugian negara Rp 429 juta lebih. Penghitungan itu juga dari sisa karcis, di mana antara sisa karcis dan dengan yang keluar ada selisih. Dari sanalah diperiksa rekening koran serta rekening yang digunakan menampung hasil retribusi di Terminal Manuver Gilimanuk.

Majelis hakim Wayan Sukanila sempat menanyakan, dari informasi yang didapat ahli, adakah uang itu dibagi ke terdakwa (menunjuk Kadis Gusti Riyadi - red)? Ahli mengatakan dari hasil informasi yang dia dapat, ada.

Ahli menambahkan, hasil pungutan mestinya disetorkan ke rekening kas daerah. Penerimaan negara tidak boleh dibagikan langsung ke SKPD, tetapi harus disetorkan dulu ke kas negara. **(kmb37)**

Edisi : Sabtu, 5 Mei 2018

Hal : 2

Bali Post

Dewan Desak TIC Segera Dioperasikan

Bangli (Bali Post) -

Tak kunjung beroperasinya Tourist Information Centre (TIC), kembali menuai sorotan legislatif. Anggota dewan meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli segera mengoperasikan TIC agar bangunan eks pesanggrahan di Kintamani yang telah susah payah ditata, tidak kembali rusak akibat terbengkalai.

Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, Jumat (4/5) kemarin, menyampaikan jika pemerintah memang merancang bangunan tersebut sebagai TIC, seharusnya pemerintah tidak perlu berlama-lama merealisasikannya. Apalagi, penataan bangunan yang menghabiskan anggaran Rp 600 juta lebih itu sudah rampung cukup lama. Dengan sudah siapnya bangunan, pemerintah dalam hal ini Disparbud, semestinya segera menyiapkan pengelola TIC. "Kami minta Disparbud bisa segera mengoperasikan tempat tersebut sehingga aset yang sudah diperuntukkan, bisa bermanfaat sesuai yang direncanakan," tegasnya.

Anggota dewan asal Kintamani itu menambahkan, jika bangunan tersebut dibiarkan begitu saja, maka dikhawatirkan akan kembali mengalami kerusakan sebelum digunakan mengingat tidak ada yang merawatnya secara berkelanjutan. Apalagi sebelumnya senderan setempat sempat jebol dan mengakibatkan sejumlah lapak milik pedagang tertimbun reruntuhan.

"Harus segera dicarikan orang-orang yang memang layak ditempatkan di sana. Begitu juga kalau masih terkendala sarana dan prasarana penunjang, paling lambat di perubahan (APBD-P 2018 - red) ini sudah bisa dilengkapi," kata Carles.

Lebih lanjut dikatakannya, dari segi lokasi, TIC sangat layak ditempatkan di lokasi yang direncanakan pemerintah saat ini. Sebab, di tempat itulah wisatawan bisa menyaksikan dengan jelas keindahan Danau dan Gunung Batur. Terlebih lagi, Bupati Bangli Made Gianyar berencana membangun pasar untuk menunjang pariwisata di Kintamani.

"Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan komitmen dari sejumlah OPD. Karena untuk penataan di sana tidak cukup dilakukan oleh Dinas Pariwisata saja, melainkan juga dilakukan oleh Disperindag, Dishub dan lainnya," ungkapnya. **(kmb41)**

Edisi : Sabtu, 5 Mei 2018

Hal : 18

Bali Post

Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 94 Miliar di Kuta dan Kuta Selatan

Tingkatkan Sektor Pariwisata, Genjot Infrastruktur

SETELAH menyerahkan hibah di Kecamatan Petang, Abiansemal dan Mengwi, Pemkab Badung kembali menyerahkan hibah tahun 2018 kepada kelompok masyarakat Kuta dan Kuta Selatan, Jumat (4/5) kemarin. Penyerahan hibah ini bertempat di Balai Desa Adat Jimbaran. Dana hibah diserahkan langsung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup I Ketut Suiasa dan Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Nyoman Karyana beserta anggota DPRD Badung Dapil Kuta dan Kuta Selatan. Nilai hibah yang diserahkan untuk kedua kecamatan ini mencapai Rp 94,3 miliar lebih untuk 104 penerima. Terdiri dari Kuta Rp 31,8 miliar lebih untuk 40 penerima dan Kuta Selatan Rp 62,5 miliar lebih untuk 64 penerima.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, pemberian hibah kepada kelompok masyarakat ini sebagai salah satu implementasi dari program Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo dengan "Revolusi Mental, Indonesia Hebat". Program ini dilakukan dengan berpikir sederhana melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan lima program prioritas.

Bupati Giri Prasta mengungkapkan, penyerahan hibah tersebut juga merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk mewujudkan desa atau kelurahan yang berdikari. Di mana diharapkan pembangunan yang dilakukan nantinya juga memanfaatkan pekerja dari desa itu sendiri. Termasuk material yang digunakan. Kecuali kalau tidak ada, dipersilakan bekerja sama dengan desa lainnya. Hal ini sebagai bentuk percepatan pembangunan dan ekonomi di desa itu sendiri. "Konsep kami adalah pembangunan tuntas, di mana dengan bantuan yang kami berikan nantinya masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk pembangunan balai banjar atau lainnya dan dana masyarakat bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri," paparnya.

Hal inilah yang dikedepankannya di Badung, sehingga masyarakat bisa mandiri berdiri di kaki mereka sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Gira Prasta juga memaparkan terkait rencana pembangunan yang akan dilakukan di Kuta Selatan ke depannya. Selain pembangunan jalan lingkar, pihaknya juga sedang membuat semacam *master plan* konsep untuk penataan Pantai Jimbaran. Nantinya setelah konsep rampung akan disampaikan ke masyarakat. Namun, dia menegaskan konsep penataan yang dilakukan Pemkab Badung adalah tetap menekankan warga Badung harus menjadi tuan di daerahnya sendiri.

Terkait pembangunan ekonomi masyarakat, kata Bupati Giri Prasta, pihaknya saat ini sedang merancang pembangunan *Outer Ring Road* atau jalan lingkar luar Kuta Selatan. Termasuk juga untuk kawasan Tanjung Benoa. Bahkan, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur ini sudah selesai dilaksanakan. Dia berharap dengan pembangunan infrastruktur jalan tersebut akan mengangkat ekonomi masyarakat Badung Selatan, khususnya yang bergerak di sektor pariwisata. "Ini sudah berjalan, pembebasan lahan sudah ditangani Tim Appraisal termasuk juga yang di Sawangan dan sejauh ini tidak ada kendala," pungkasnya. **(ad289)**

SERAHKAN HIBAH - ***Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Suiasa saat menyerahkan hibah untuk kelompok masyarakat di Kuta dan Kuta Selatan, dipusatkan di Jimbaran.***

Edisi : Sabtu, 5 Mei 2018

Hal : 3

Bali Post

Pemantauan Proyek Biogas

Dewan Minta Pemerintah Tak Sekadar Gelontorkan Bantuan

Semarapura (Bali Post) -

Proyek biogas di Nusa Penida yang "diobrak-abrik" Kejaksaan Negeri Klungkung lantaran diduga korupsi juga mendapat atensi kalangan DPRD Klungkung. Kamis (3/5) kemarin, Komisi II melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Beberapa hal menjadi temuan.

Anggota Komisi I Gde Artison Andarawata mengatakan kedatangannya ke wilayah kepulauan itu bersama ketua komisi dan beberapa anggota. Sesuai hasil pemantauannya, beberapa proyek biogas sudah ada yang sempat dimanfaatkan warga. Hanya saja berlangsung sesaat. Setelah itu gasnya tidak lagi keluar. "Malahan ada yang tidak tahu cara pemakaiannya. Beberapa ada yang dikatakan bisa terpakai," ungkapnya.

Jika digarap secara optimal, bantuan semacam ini sejatinya sangat membantu meringankan beban perekonomian masyarakat, terutama yang tergolong kurang mampu, di samping mendukung program pemerintah yang menggalakkan energi terbarukan. Namun, berbeda dengan kondisi di lapangan, terkesan hanya digarap dan diserahkan begitu saja, tanpa ada pendampingan lebih lanjut. "Ini tidak diawasi. Dibiarkan begitu saja. Kami berharap biogas yang masih layak itu bisa dimanfaatkan supaya tak mangkrak," kata Politisi Demokrat ini.

Seperti diketahui, proyek yang tersebar di Desa Kutampi Kaler, Sakti dan Klumpu dengan total 40 unit, anggaran pembangunannya mencapai Rp 890 juta. Itu telah diusut Kejaksaan Negeri Klungkung lantaran diduga ada bau korupsi. Disebut sebut, penetapan tersangka yang dikabarkan bakal menyere. oknum pejabat segera dilaksanakan. Tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keterangan ahli teknik. "Ini yang menjadi dasar untuk menetukan kerugian apakah *total cost* atau *real cost*. Kalau sudah keluar, baru bisa menetapkannya (tersangka - *red*)," ungkap Kasi Pidsus Meyer Volmar Simanjuntak.

Disampaikan lebih lanjut, ahli teknik yang memberikan keterangan ada dua orang. Hanya tidak disebutkan siapa orangnya. Hasilnya ditargetkan sudah keluar minggu depan. Guna memperkuat siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, pihaknya juga meminta keterangan dari ahli pidana. Tak menutup kemungkinan dapat memperkuat alat bukti. "Kalau kami semakin banyak bukti, semakin bagus," sebut pria asal Medan, Sumatera Utara ini. **(kmb45)**

Edisi : Jumat, 4 Mei 2018

Hal : 12

Bali Post

Pelabuhan Tanah Ampo Dapat Suntikan Rp 4,8 Miliar

PROYEK pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo kembali mendapat kucuran pendanaan dari pemerintah pusat. Kali ini Kementerian Perhubungan menyuntikkan dana segar Rp 4,8 miliar. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padangbai I Ketut Gede Sudarma mengungkapkan hal itu, Rabu (2/5) kemarin. Sejak tahun berapakah pelabuhan yang direncanakan untuk lego kapal pesiar itu sudah dipersiapkan?

Tambahan dana Rp 4,8 miliar itu, hemat Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padangbai Made Sudarma, untuk proses *finishing* dua proyek yang digarap secara bersamaan sebelumnya, yaitu untuk pembangunan *brakewater* dan *jety ramdor*.

Kedua proyek itu sesungguhnya bertujuan agar dermaga itu bisa disandari perahu sekoci. Proyek diperuntukkan *finishing* itu sejauh ini sudah memasuki proses tender. "Dananya sudah siap. Tingggal menunggu tender saja. Ini saya sedang di Jakarta, konsultasi di Kementerian Perhubungan untuk tujuan tersebut," terangnya.

Brakewater dibangun memanjang sepanjang 135 meter dari pertengahan dermaga ke arah barat. Pembangunan *breakwater* itu diawali pemasangan tiang pancang yang sudah kelar beberapa minggu lalu. Sebelumnya pelaksana proyek juga sudah menyelesaikan pemasangan tetraport di pinggir *jety ramdor*.

Proyek *breakwater* dan *jety ramdor* dimulai 18 Agustus 2017 dengan anggaran awal Rp 49 miliar. Berdasarkan perencanaan, pembangunan kedua fasilitas tambahan itu seharusnya sudah kelar akhir Maret lalu. Namun kemudian molor karena berbagai persoalan. Salah satunya dampak dari aktivitas vulkanik Gunung Agung. Dengan terbangunnya *breakwater* dan *jety ramdor*, kapal pesiar apalagi yang berukuran besar, tetap akan lego jangkar di tengah perairan. *Breakwater* dan *jety ramdor* itu dibangun untuk memberi akses perahu sekoci terutama dari sisi keamanan untuk meyiasati kuatnya arus laut perairan Tanah Ampo.

Pelabuhan Tanah Ampo itu dibangun mulai 2006. Anggaran dengan cara patungan. Selain kucuran dana dari pemerintah pusat, juga ada suntikan dari Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem sendiri. Pusat membiayai proyek di sisi laut, provinsi membiayai pembangunan terminal dan pemerintah kabupaten mengurus masalah lahannya. Selama bertahun-tahun proyek itu mangkrak. Tidak ada kapal pesiar yang sudi singgah karena dermaga itu kurang panjang. Selama mangkrak, fungsi pelabuhan itu lebih banyak digunakan untuk aktivitas memancing. Sedangkan gedung terminal itu difungsikan sebagai posko induk penanganan erupsi Gunung Agung.

Bendesa Adat Tanah Ampo Gede Suyadnya mengatakan, warga Tanah Ampo berharap pelabuhan segera beroperasi. Dengan hadirnya pelabuhan wisata, warga setempat berharap bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan ikut berkecimpung di sektor pariwisata. "Warga kami menunggu-nunggu pelabuhan secepatnya beroperasi," ungkapnya. **(kmb)**

Edisi : Kamis, 03 Mei 2018

Hal : 8

Bali Post

Kejaksaan Minta Keterangan Ahli Sebelum Penetapan Tersangka,

Semarapura (Bali Post) -

Langkah Kejaksaan Negeri Klungkung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek biogas di Kecamatan Nusa Penida terus berlanjut. Penetapan tersangka tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keterangan ahli teknik.

"Ini yang menjadi dasar untuk menetukan kerugian apakah *total cost* atau *real cost*. Kalau sudah keluar, baru bisa menetapkannya (tersangka-*red*)," ungkap Kasi Pidsus Meyer Volmar Simanjuntak, Rabu (2/5) kemarin. Disampaikan lebih lanjut, ahli teknik yang memberikan keterangan ada dua orang. Hanya tidak disebutkan siapa orangnya.

Hasilnya ditargetkan sudah keluar minggu depan. Guna memperkuat siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, pihaknya juga meminta keterangan dari ahli pidana. Tak menutup kemungkinan dapat memperkuat alat bukti. "Kalau kami semakin banyak bukti, semakin bagus," sebut pria asal Medan, Sumatera Utara ini.

Bali Post/sos

Meyer Volmar Simanjuntak

Seperti berita sebelumnya, proyek tersebut tersebar di Desa Kutampi Kaler, Sakti dan Klumpu dengan total nilai Rp 890 juta. Sesuai hasil pengecekan dari 40 titik, yang dikerjakan hanya 38 titik dan seluruhnya mangkrak. Sementara sisanya lagi dua titik laporannya dibuat fiktif. "Kami sudah periksa sekitar 70 saksi. Ada dari penerima, pejabat, maupun pemborong," sebutnya.

Dari itu, pihaknya mengaku telah mengantongi nama tersangka yang merupakan oknum pejabat. Hanya namanya belum bisa disampaikan. Sempat dibeberkan, proyek yang berjalan tahun 2014 itu dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan KB yang kini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. Status tersangka juga berpotensi menjerat oknum anggota dewan Klungkung yang kala itu disebut-sebut sebagai pelaksana proyek. **(kmb45)**

Edisi : Kamis, 03 Mei 2018
Hal : 12